

PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI SULAWESI UTARA TAHUN 2003-2018

Syuli Mamoto¹, Daisy S.M. Engka², Ita Pingkan F. Rorong.³

^{1,2,3} *Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia*

Email : smamoto3@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang bertujuan antara lain tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tujuan pembangunan Indonesia itu sendiri adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis upah minimum Provinsi, tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara tahun 2003-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistika. penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dengan model analisis regresi linear berganda dan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis adalah SPSS 22. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel upah minimum Provinsi tidak mempunyai pengaruh dan signifikansi terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara, tingkat pendidikan tidak mempunyai pengaruh dan signifikansi terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara. Secara simultan upah minimum Provinsi dan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara.

Kata Kunci: Upah Minimum Provinsi; Tingkat Pendidikan; Tenaga Kerja; Sulawesi Utara.

ABSTRACT

Development is essentially a process of continuous change towards a better state based on certain norms. The economic development pursued by developing countries aims, among other things, to achieve prosperity and prosperity for the entire community. The goal of Indonesia's development itself is to create a just, prosperous, prosperous society and improve the standard of living of the Indonesian people. The purpose of this study was to analyze the provincial minimum wage, the level of education on labor absorption in North Sulawesi in 2003-2018. The data used in this study are secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics data. this research is a type of quantitative descriptive research with multiple linear regression analysis models and the software used to perform the analysis is SPSS 22. The results of the analysis show that the Provincial Minimum Wage variable has no influence and significance on employment in North Sulawesi, the level of education has no influence and significance on employment in North Sulawesi. Simultaneously, the Provincial Minimum Wage and Education Level have an influence on employment in North Sulawesi.

Keywords: *Provincial Minimum Wage; Education Level; Labor; North Sulawesi.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang bertujuan antara lain tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan merupakan upaya perubahan struktural yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk. Tujuan pembangunan Indonesia itu sendiri adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa tenaga kerja adalah salah satu faktor yang mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi. Cita-cita pembangunan yang akan mengarah pada pembangunan ekonomi hanya dapat dimulai dan dilaksanakan oleh komponen tenaga kerja dalam suatu perekonomian tanpa intervensi dari tenaga kerja. Tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi merupakan salah satu faktor modal utama dalam perekonomian yang memiliki dampak langsung dalam tingkat pembangunan suatu daerah (Anuari, 2018).

Perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Tenaga kerja sebagai salah satu factor produksi merupakan unsur yang penting dan paling berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi, sistem produksi, distribusi maupun investasi. Keterlibatan dengan adanya distribusi menyebabkan mereka menginginkan atau mendapatkan pendapatan yang memadai, tingkat keamanan, kenyamanan kerja, dan serta keuntungan lain yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari sumber daya manusia dalam mengelolanya. Dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, dan juga merupakan konsumen pembangunan itu sendiri (Purnami, 2015).

Menurut UU Pokok Ketenagakerjaan No.14 Tahun (1969), Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja (Undang-undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Tenaga kerja dalam pembangunan nasional merupakan faktor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan

Pendidikan masih menjadi salah satu fokus dalam pembangunan Indonesia sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ada pada faktor pendidikan saja, dapat diketahui, Pendidikan dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008) yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam penyerapan tenaga kerja, pendidikan masih menjadi salah satu fokus dalam pembangunan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu factor juga yang dapat menyerap tenaga kerja yaitu upah minimum. Upah minimum adalah salah satu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis Pengaruh upah minimum Provinsi dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi utara. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi utara
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi utara
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi utara

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Ekonomi Pembangunan

Perekonomian dari jaman dahulu sampai sekarang, terus dan terus mengalami perubahan dan juga perkembangan. Diharapkan perkembangan itu menjadi lebih baik lagi, namun dalam realitanya perkembangan ekonomi tidak bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pengembangan perekonomian, hal tersebutlah yang kadang menjadi kendala dalam menciptakan perekonomian yang lebih bagus. Selain karena perekonomian sifatnya sangat mengglobal dan perekonomian satu daerah kedaerah lain maupun dari satu negara ke negara lain saling mempengaruhi maka tidak hanya satu atau dua negara saja yang memikirkan bagaimana cara mengembangkan perekonomian menuju arah yang lebih baik, bahkan seluruh dunia memikirkannya. Berbicara masalah ekonomi, dari periode satu ke periode berikutnya perkembangan ekonomi senantiasa menjadi pokok pembicaraan yang menarik (Nurcholis, 2014).

2.2 Teori Tenaga Kerja

Secara umum tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun (2003) Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua

kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usaha dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan diatas 17 tahun ada pula yang menyebutkan diatas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan diatas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

Menurut Undang-undang No. 13 tahun (2003), tentang ketenagakerjaan pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-undang No. 13 tahun (2003) tentang ketenagakerjaan pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi, kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan dan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan terus menerus mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan keluarga. Pemerintah melihat masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral pembangunan nasional, karena ketenagakerjaan itu pada hakikatnya adalah tenaga pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa termasuk pembangunan di sektor ketenagaan itu sendiri. Menurut Maharani, (2017) pembangunan ketenagakerjaan bertujuan 1) Memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimim, 2) Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional. 3) Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya. 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Menurut Hafid dan Mudakir (2014) secara garis besar penduduk suatu Negara dibedakan menjadi dua golongan tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong tenaga kerja adalah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda antara satu negara yang lain, seperti di Indonesia batas usia kerja minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum, jadi setiap orang atau semua penduduk yang sudah berusia 10 tahun tergolong sebagai angkatan kerja.

Menurut Suparmoko, (2002), penduduk dalam usia kerja dapat digolongkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang belum bekerja namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan penerima pendapatan.

2.3 Teori Upah

Upah merupakan imbalan jasa yang diterima oleh seseorang didalam hubungan kerja berupa uang atau barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa, dan diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri, dan keluarganya. Upah dalam teori ekonomi, yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh para pengusaha kepada tenaga kerja. Upah merupakan salah satu unsur pokok dalam perusahaan, karena ketidakpastian dalam menentukan besarnya upah akan sangat merugikan perusahaan. Upah minimum diarahkan kepada pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak perlu ditetapkan oleh menaker. Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan tingkat kemampuan dunia usaha (Tapparan, 2017).

Dalam mewujudkan suatu penghasilan yang dapat memenuhi penghasilan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan adanya kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Adapun kebijakan pengupahan yang dapat melindungi pekerja/buruh terdapat dalam pasal 88 ayat 3 Undang-undang (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003), yang terdiri atas:

Upah minimum, Upah kerja lembur, Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, Bentuk dan cara pembayaran upah, Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Struktur dan skala pengupahan yang proposional, Upah untuk pembayaran pesangon, dan Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

UMn = Upah minimum yang akan ditetapkan

Umt = Upah minimum tahun berjalan

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan

Δ PDBt = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan

2.4 Pendidikan

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian didalam maupun diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masyarakat, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Menurut Ahmadi, (2016) bahwa pendidikan adalah proses pengendalian secara sadar dimana perubahan-perubahan didalam tingkah laku dihasilkan didalam diri orang lain itu melalui didalam kelompok. Dari pandangan ini pendidikan adalah suatu proses yang dimulai pda waktu lahir dan berlangsung sepanjang hidup. Menurut Septiansyah dan Ghalib, (2018) menjabarkan bahwa pendidikan itu meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya atau yang dikerjakan oleh orang lain untuk dia, dengan tujuan mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan. Menurut John Dewey, mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi didalam pergaulan biasa dan pergaulan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakuakn oleh Indradewa dan Natha, (2015) yang menganalisis pengaruh inflasi, PDRB, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di propinsi bali, pertumbuhan jumlah penduduk di Negara Indonesia semakin lama semakin besar, begitu juga pertumbuhan penduduk di Provinsi bali. Jumlah tenaga kerja yang bertambah akan menjadi masalah dalam dunia ketenagakerjaan apabila jumlah tenaga kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah permintaan tenaga kerja yang mampu menyerapnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari tiga faktor yang secara teori memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut di Provinsi bali adalah inflasi, PDRB, dan upah minimum. Data yang digunakan adalah data time series selama dua puluh tahun yakni dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2013.

Penelitian yang di lakukan oleh Wihastuti dan Rahmatullah, (2018) yang menganalisis upah minimum Provinsi dan penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh upah minimum Provinsi (UMP) dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dipulau jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel dengan 6 Provinsi dipulau jawa selama periode 2011-2016. Model terbaik yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah model *fixed effect*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan UMP tetap menjadi kendala terciptanya keadilan dipasar tenaga kerja karena menciptakan kelakuan harga. Hasil tersebut memberikan indikasi bagi pengambil kebijakan untuk lebih berhati-hati dalam menentukan besaran UMP agar tidak mendestruksi tujuan utama pembangunan yaitu menciptakan kesejahteraan umum.

Penelitian yang di lakukan oleh Lubis, (2014) yang menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan pekerja dan pengeluaran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan pekerja dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari 33 Provinsi di Indonesia periode tahun 2006-2012. Data diolah dengan menggunakan data panel dengan model regresi *fixed effect*. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari persamaan regresi dan nilai koefisien determinan (R^2). Hasil penelitian ini dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa variabel jumlah tenaga kerja, tingkat

pendidikan pekerja dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2006-2012.

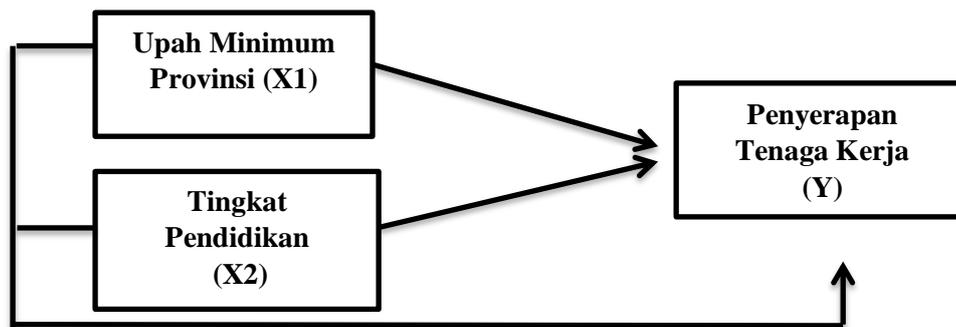
Penelitian yang dilakukan oleh Ziyadaturrofiqoh, Zulfanetti dan Safari (2018) yang menganalisis pengaruh PDRB, upah minimum Provinsi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi, jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PDRB, UMP, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi periode 1997-2015. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel bebas yang diteliti mampu menjelaskan 91 persen terhadap penyerapan tenaga kerja dan sisanya 9 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Secara parsial PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi, sedangkan UMP dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ganie (2017) yang menganalisis pengaruh upah, tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi. Data yang digunakan berupa data time series. Adapun hasil penelitian ini antara lain Upah, tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau. Sedangkan faktor yang dominan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau adalah faktor jumlah penduduk dimana faktor tersebut memiliki nilai koefisien regresi yang paling besar diantara faktor lainnya.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah konsep yang menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk hubungan antar variabel penelitian (Sugiyono, 2013).

Gambar 1 Kerangka pemikiran



Sumber: diolah penulis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga upah minimum Provinsi memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara
2. Diduga tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga di Sulawesi Utara
3. Diduga upah minimum dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga di Sulawesi Utara

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka- angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistik. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah

minimum yang ada di Sulawesi utara, tingkat pendidikan yang ada di Sulawesi utara, dan penyerapan tenaga kerja yang ada di Sulawesi utara. Data yang diambil dari tahun 2003-2018.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series, dengan periode pengamatan tahun 2003-2018. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, data jurnal, artikel-artikel, studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dalam penelitian ini. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data peneliti yang diperoleh dari terbitan atau laporan suatu lembaga terkait. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini upah minimum Sulawesi utara yang diperoleh dari, Dinas ketenagakerjaan Sulawesi utara, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja Sulawesi Utara yang diperoleh dari, BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- Upah minimum Provinsi (X1) adalah upah bulanan terendah terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang ada diperusahaannya yang diukur dalam satuan juta Rp/Tahun
- Tingkat pendidikan (X2) adalah suatu proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan, pengetahuan, dan meningkatkan kemandirian maupun pembentukan kepribadian seseorang yang diukur dalam satuan jiwa/Tahun.
- Penyerapan tenaga Kerja (Y) adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan diisi oleh pencari kerja (Todaro dan Smith, 2003). Penyerapan tenaga kerja diukur dalam satuan jiwa/Tahun

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Adapun persamaan regresi linear berganda dengan dua variabel dependen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ln}Y_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_{1t} + \beta_2 \text{Ln}X_{2t} + e_t$$

Keterangan :

- Y = penyerapan tenaga kerja
 a = Konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien regresi
 X_1 = Upah Minimum
 X_2 = Tingkat Pendidikan
 e = Standar Error
 t = 1,2,3,... 16 (*time series* 2003-2018)

Uji Statistik Parsial (Uji-t)

Uji statistik t dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan t < 0.05 maka dapat diartikan bahwa variabel independent secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2018).

Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama – sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan F < 0.05 maka dapat diartikan bahwa variabel independent secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2018)

Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama–sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R – Squared. Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi

dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square (R^2) pada tabel Model Summary. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai R^2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas (Ghozali, 2018).

Uji Asumsi Klasik

Menurut Sugiyono, (2013) Untuk mengetahui model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak untuk digunakan sehingga perlu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas

1. Uji Normalitas

Pada model regresi ini digunakan untuk mengetahui dan menguji apakah nilai yang dihasilkan dari regresi telah terdistribusi secara normal atau tidak terdistribusi secara normal. Untuk mengetahui populasi terdistribusi normal atau tidak maka dalam penelitian ini dapat menggunakan uji melalui metode grafik. Metode grafik dalam penelitian ini adalah dengan melihat normal probability plot. Normal probability plot adalah membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2018). Jika hasil pengujian yang telah dilakukan tersebut menghasilkan data menyebar disekitar garis diagonal sebagai representasi pola distribusi normal, berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas maka dapat dikatakan data telah terdistribusi normal.

2. Multikolinieritas

Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2018).

3. Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*time series*) atau ruang (*cross section*). Kondisi ini sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data berupa time series. Uji autokorelasi disini digunakan uji *Durbin-Watson*. (1) Jika nilai Durbin-Watson lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4dL) maka terdapat autokorelasi ; (2) jika nilai Durbin-Watson terletak antara dU dan (4-dU), maka tidak ada autokorelasi dan (3) jika nilai Durbin-Watson terletak antara dL dan dU atau diantara (4dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

4. Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan uji *grafik plot* untuk menguji masalah heteroskedastisitas data. Jika probabilitas signifikansi pada semua variabel independen diatas tingkat kepercayaan 5% maka tidak terdapat heteroskedastisitas

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel independen dan variabel dependen maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Tahun 2001-2021.

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics			
					B	Std. Error	Beta	Tolerance
1	(Constant)	4.835	.151		32.016	.000		
	upah minimum provinsi	.083	.050	.471	1.649	.123	.131	7.630
	tingkat pendidikan	.128	.077	.473	1.655	.122	.131	7.630

Sumber : Hasil olahan SPSS

Dari persamaan regresi linier berganda di atas, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: Pengangguran $LnY_t = a + 0,083 LnX_{1t} + 0,128 LnX_{2t} + e_t$
 Hasil regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) 4.835 sebesar menunjukkan jika variabel independen lainnya bernilai nol, maka variabel dependen penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara tetap bernilai 4.835
- b. Nilai koefisien regresi upah minimum Provinsi bernilai positif sebesar 0,083 menunjukkan bahwa setiap Peningkatan 1% dari upah minimum Provinsi menyebabkan penurunan penyerapan tenaga sebesar 0,083%.
- c. Regresi tingkat pendidikan bernilai positif namun tidak signifikan sebesar 0,128 menunjukkan bahwa setiap Peningkatan 1% dari tingkat pendidikan menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,128 %.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 1, maka diperoleh hasil analisis uji t sebagai berikut :

1. Pengaruh upah minimum Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara Dari hasil pengujian secara parsial dari nilai t hitung dan t tabel (2.160), menunjukkan nilai t hitung < t tabel (1.649 < 2.160) dan nilai signifikansi 0.123 pada tingkat signifikansi 0,05, hal ini menunjukkan Ho diterima dan Ha ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa upah minimum Provinsi secara parsial tidak berpengaruh signifikansi terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja Dari hasil pengujian secara parsial dari nilai t hitung dan t tabel (2.160), menunjukkan nilai t hitung < t tabel (1.655 < 2.160) dan nilai signifikansi 0.122 pada tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan secara parsial tidak berpengaruh tapi signifikani terhadap penyerapan tenaga kerja.

Uji Simultan (F)

Tabel 2. Hasil Regresi Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.025	2	.013	40.24	.000
	Residual	.004	13	.000	2	b
	Total	.029	15			

Sumber : Hasil olahan SPSS

Berdasarkan hasil pengujian yang terlihat pada tabel 4.5 diperoleh F hitung sebesar 40.242 dan nilai F tabel 3.806, menunjukkan F hitung > F tabel (40.242 > 3.806) dan signifikansi 0.000 pada tingkat signifikansi 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa upah minimum Provinsi dan tingkat pendidikan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikansi terhadap penyerapan tenaga kerja

Koefisien Determinasi (R²)

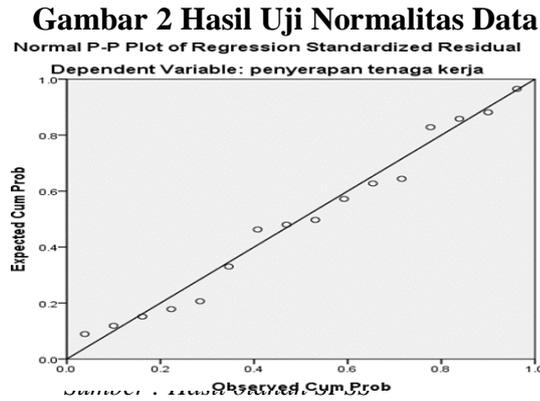
Tabel 3 Hasil Regresi Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.928 ^a	.861	.840	.01768	2.055

Sumber : Hasil olahan SPSS

Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu upah minimum Provinsi dan tingkat pendidikan. menerangkan variabel dependen yaitu tenaga kerja sebesar 86,1% sedangkan sisanya sebesar 13,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji Normalitas Data



Dari uji P-P Plot di atas terlihat bahwa sebaran data membentuk atau mengikuti garis linear sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Data

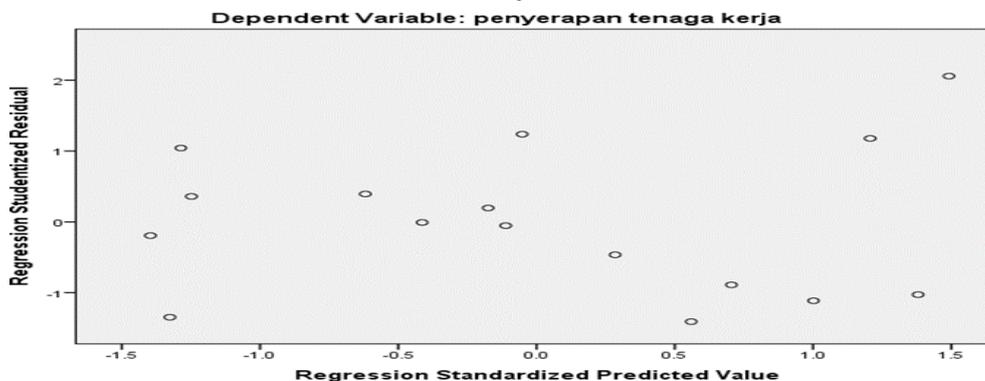
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.835	.151		32.016	.000		
upah minimum provinsi	.083	.050	.471	1.649	.123	.131	7.630
tingkat pendidikan	.128	.077	.473	1.655	.122	.131	7.630

Sumber : Hasil olahan SPSS

Nilai VIF variabel modal usaha, lama usaha, jam kerja < 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Scatterplot



Sumber : Hasil olahan SPSS

Hasil uji menunjukkan tidak ada pola tertentu yang menunjukkan titik yang sama karena titik meyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala homoskedastisitas atau H0 ditolak.

Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.928 ^a	.861	.840	.01768	2.055

Sumber : Hasil olahan SPSS

Dari hasil uji diatas dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Pada kolom *Durbin-Watson* diketahui nilai DW hitung sebesar 2.055, pada DW tabel dapat diperoleh nilai DL dan DU, yaitu DL sebesar 0.982 dan DU sebesar 1.539. Karena nilai DW hitung terletak pada antara $DU < DW < 4-DU$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil analisis upah minimum Provinsi dapat dilihat bahwa tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Serta berdasarkan uji secara parsial (Uji t) di peroleh nilai tidak signifikan. Hal ini juga sesuai dengan hipotesis yang ada, yang menyatakan bahwa upah minimum Provinsi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara kesimpulannya yaitu upah minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mankiw, (2013), yaitu teori upah efisiensi, upah tidak memiliki dampak penurunan penyerapan tenaga kerja disebabkan ketika upah naik maka pekerja mampu untuk memenuhi kehidupan hidup lebih tinggi. Ketika para pekerja yang memperoleh upah yang lebih tinggi dapat mengkonsumsi lebih banyak nutrisi dan akan lebih sehat dan lebih produktif, dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan dapat menarik kelompok pelamar yang berkualitas.

Penelitian ini juga dikemukakan oleh Silva, dkk. (1990) bahwa apabila pekerja dengan mendapatkan upah yang tinggi maka dia dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum hidupnya dan dampak secara ekonomi yang dimunculkan bagi perusahaan adalah tingginya tingkat produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil analisis pada tingkat pendidikan dapat dilihat bahwa memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan juga uji t dari 1 dapat dilihat bahwa pada variabel tingkat pendidikan menunjukkan nilai t hitung sebesar lebih kecil dari t tabel dan mendapat nilai signifikansi lebih besar dari nol koma nol lima. Hasil ini menunjukkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, secara kesimpulannya yaitu tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ganie, (2017) yaitu hasil penelitiannya menunjukkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau. Fenomena disebabkan banyak perusahaan baik perusahaan tambang batu bara maupun perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Berau yang lebih membutuhkan tenaga kerja operasional di lapangan (lokasi tambang/kebun), disamping itu perusahaan mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk tenaga kerja dari berbagai tingkat pendidikan tersebut yang mempunyai standargaji/upah masing-masing.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa upah minimum Provinsi dan tingkat pendidikan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan nilai signifikansi menunjukkan hasil lebih kecil dari nol koma nol lima jadi kesimpulannya upah minimum Provinsi dan Tingkat Pendidikan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Upah minimum Provinsi secara parsial tidak mempunyai pengaruh dan signifikansi terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara Tahun 2003-2018.
- b) Tingkat pendidikan secara parsial tidak mempunyai pengaruh dan signifikansi terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara Tahun 2003-2018.
- c) Upah minimum dan tingkat pendidikan secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara Tahun 2003-2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, P. P. D. W. (2016). *Strategi Public Relations Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan (Studi Kasus di SDIT Qurrota A" yun Ponorogo)*. Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana STAIN.
- Anuari, D. (2018). *Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2010-2016 Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Elvio G. Silva, M. D., Susan S. Robey-Cafferty, M. D., Terry L. Smith, B.S., M. S., & David M. Gershenson, M. D. (1990). Ovarian carcinomas with transitional cell carcinoma patter. *American journal of clinical pathology*, 93(4), 457–465. <https://doi.org/10.1093/ajcp/93.4.457>
- Ganie, D. (2017). Analisis Pengaruh Upah Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. *Jurnal Eksekutif*, 14(2), 332–354. <http://jurnal.ibmt.ac.id/index.php/jeksekutif/article/view/150>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. ISBN, UNDIP.
- Hafid, M., & Mudakhir, Y. B. (2014). *Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah Tenaga Kerja Industri Tekstil di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang RI no. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Cipta Jaya.
- Inradewa, I. G. A., & Natha, K. S. (2015). Pengaruh inflasi, PDRB dan Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(8), 923–950.
- Lubis, C. A. B. E. (2014). Pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan pekerja dan pengeluaran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Economia*, 10(2), 187–193. <https://doi.org/10.21831/economia.v10i2.7544>
- Maharani, A. S. (2017). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Kalimantan*. Universitas Islam Indonesia.
- Mahfud, V. A. (2014). *Harmoni Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek*. Brawijaya University.
- Mankiw, N. G. (2013). *Macroeconomics* (8th ed). Worth Publishers.
- No, U.-U. (13M). Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2. *LAMPIRAN REKAPITULASI DATA*.
- Nurcholis, M. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks

- Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 48–57. <https://doi.org/10.22219/jep.v12i1.3654>
- Purnami, I. (2015). *Pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.
- Septiansyah, Z. B., & Ghalib, M. (2018). Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Ijtihad*, 34(1), 27–34.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*. ANDI.
- Tapparan, S. R. (2017). Pengaruh upah minimum dan investasi terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrare*, 4(1).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga: Vol. Jilid 2* (Edisi kedelapan). Erlangga.
- Undang-Undang, R. I., UNDANG-UNDANG, M. E., & INDONESIA, P. R. (2003). Nomor 13 Tahun 2003. *Tentang Ketenagakerjaan*.
- Wihastuti, L., & Rahmatullah, H. (2018). Upah minimum provinsi (UMP) dan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 96–102.
- Ziyadaturrofiqoh, Z., Zulfanetti, Z., & Safri, M. (2018). Pengaruh PDRB, upah minimum provinsi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 7(1), 13–22. <https://doi.org/10.22437/jels.v7i1.4514>